

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Keberadaan sekolah dengan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat butuh kepada pendidikan yang hanya disediakan sekolah, dan sekolah butuh kepada peranserta masyarakat demi kelangsungan proses belajar mengajarnya. Bukan hanya itu, lembaga persekolahan juga merupakan wahana dimana tumbuh dan berkembangnya suatu budaya yang berlaku dalam masyarakat, sehingga keberadaan sekolah tidak tak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah Pusat/daerah, orang tua siswa, dan masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatannya. Baik dalam memberikan bantuan secara finansial, barang, bangunan, atau dengan memberikan sumbang pikiran terhadap kelangsungan sekolah.

Masyarakat umum dan orang tua siswa sendiri memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk berperan lebih besar dalam membantu sekolah. Pemerintah Pusat/Daerah pun memiliki kemampuan yang terbatas, sebab banyaknya sektor pembangunan yang harus dibiayai yang berakibat pada kecilnya anggaran untuk dunia pendidikan dari tahun ke tahun. Dalam pada itu, kehadiran masyarakat dengan segala komponennya sangat diharapkan untuk dapat menutupi kekurangan tersebut.

Salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki kemampuan adalah pihak dunia usaha (perusahaan swasta) sebab kehadiran dari sisi ekonomi

adalah mencari untung. Walaupun demikian, pihak perusahaan tetap mempunyai komitmen untuk terus membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya sebagai "pagar sosial" yang akan menentukan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Hal mana telah banyak dilakukan oleh EMOI dan PTA dalam berbagai bidang, baik pendidikan maupun lainnya. Khusus dalam bidang pendidikan, banyak bantuan yang telah diberikan bahkan jutaan US dollar akan tetapi sayangnya belum diikuti dengan meningkatnya mutu pendidikan itu sendiri. Logikanya, ketika seseorang banyak makan, yang diharapkan adalah akan sehat dan gemuk. Tapi kehadiran partisipasi mereka selama ini belum diiringi dengan meningkatnya mutu pendidikan itu sendiri. Padahal kehadiran mereka pada intinya adalah untuk menutupi kekurangan yang ada di sekolah.

Diketemukan bahwasanya penyebab dari semua itu adalah karena kurangnya pelibatan pihak sekolah pada tahapan perencanaan, pihak perusahaan lebih percaya pada timnya sendiri yang melakukan survey secara acak meski pun ada sekolah-sekolah yang mengajukan permohonan bantuan namun surat itu tidak pernah dijadikan pedoman. Disamping itu, pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan supervisi/pengawasan dan/atau dengan membentuk tim verifikasi terhadap sampainya bantuan di sekolah-sekolah sasaran dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Hal ini agak lebih baik apa yang dilakukan PTA sebab disamping melakukan survey oleh tim sendiri, juga berpedoman pada sejumlah surat yang diajukan sekolah. Juga membentuk tim verifikasi yang bekerja memastikan barang disampaikan ke sasaran dan digunakan sesuai dengan fungsinya terhadap kegiatan belajar mengajar.

## **B. Implikasi**

Partisipasi dunia usaha terus dilanjutkan dengan matangnya tahap perencanaan dimana keterlibatan pihak sekolah tidak dapat diabaikan dalam merencanakan program ini, karena pihak sekolah lebih tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Meskipun pihak perusahaan memanfaatkan jasa kontraktor dalam menyalurkan bantuannya, hal mana tidaklah mengapa, akan tetapi mutu dan kualitas barang tetap dikontrol oleh pihak perusahaan jangan sepenuhnya diserahkan kepada rekanan yang notabenenya mencari untung. Sebaiknya pihak perusahaan berhubungan langsung dengan sekolah sasaran dan dengan instansi terkait pada tingkat yang lebih tinggi.

## **C. Rekomendasi**

1. Untuk melahirkan *Good image* dalam masyarakat, perlu diteruskan bantuan dalam berbagai bentuk bahkan bukan hanya untuk sekolah dan siswa tapi untuk para tenaga kependidikan pun perlu diusahakan;
2. bantuan yang diberikan agar bersifat pembinaan bukan spontanitas dan bersifat sekedar;
3. dalam merencanakan bantuan ke sekolah kiranya pihak dunia usaha dapat meminta data ke sekolah-sekolah dan dinas terkait untuk ketepatan penentuan sekolah sasaran dan jenis kebutuhannya;
4. pengawasan agar dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan, baik saat bantuan dikirim maupun pemanfaatannya di sekolah sasaran;

5. pihak perusahaan agar meminta suatu bentuk pelaporan dalam jangka waktu tertentu dari sekolah yang kemudian hasil laporan tersebut diikuti dengan tindak lanjut;
6. perlu adanya suatu bentuk *memorandum of understanding* terhadap bantuan yang diberikan, hal mana sebagai tanggungjawab sekolah agar bantuan yang diberikan digunakan seoptimal mungkin; dan
7. perlu dibentuk tim yang mensurvey secara kontinyu, dan bilamana diketemukan bantuannya yang sudah tidak layak pakai atau rusak sedianya pihak perusahaan juga menyediakan dana perawatan atau segera membantu dengan yang lain atau yang baru.
8. perlu dibentuknya komite yang khusus bertugas dalam hal-hal kemasyarakatan dan termasuk juga didalamnya pendidikan yang terdiri dari pihak perusahaan, instansi terkait, pihak sekolah, dan pihak tokoh masyarakat ;
9. untuk melahirkan partisipasi yang lebih tinggi lagi dari dunia usaha, kiranya perlu proaktif pemerintah daerah yang didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan yuridisnya;

